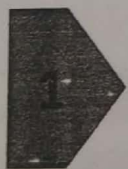


DISHUB



66
PENYUSUNAN REVISI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA, 2013 – 2018
99



KETERPADUAN KELEMBAGAAN, PERENCANAAN
SIP, DAN PENGANGGARAN

KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD
PADANG LAWAS UTARA 2013-2018

LATAR BELAKANG

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah yang berdampak pada perencanaan, peranggaran dan kelembagaan pemerintahan daerah di Indonesia.

2

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Perangkat Daerah sebagai turunan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berdampak pada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyusun perangkat daerah baru sesuai hasil pemetaan urusan konkuren.

3

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016

Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

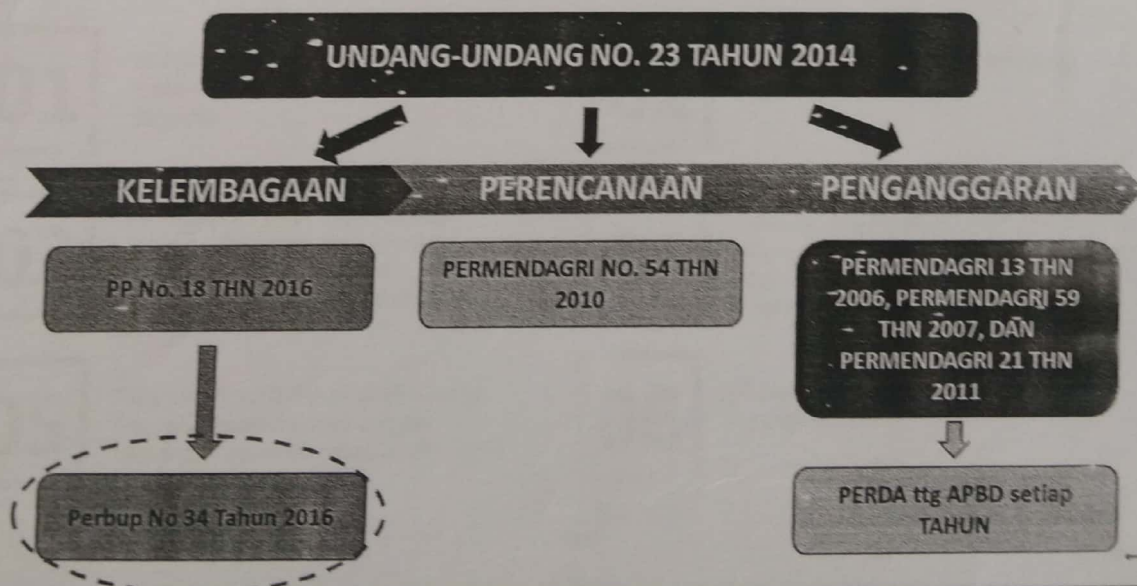
Peraturan ini mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

4

Perbup No 34 Tahun 2016

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

KETERPADUAN KELEMBAGAAN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



DASAR PERUBAHAN RPJMD

Pasal 282 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

1

- ❑ Hasil pengendalian & evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dg tahapan & tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri No. 54/2010
- ❑ Hasil pengendalian & evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri No. 54/2010;
- ❑ terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- ❑ merugikan kepentingan nasional

2

Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- ❑ RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan **hasil pengendalian dan evaluasi** tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

REGULASI RPJMD

01

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

02

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

03

PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

04

Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menekankan untuk dilakukan Revisi Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2013 – 2018

05

Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019

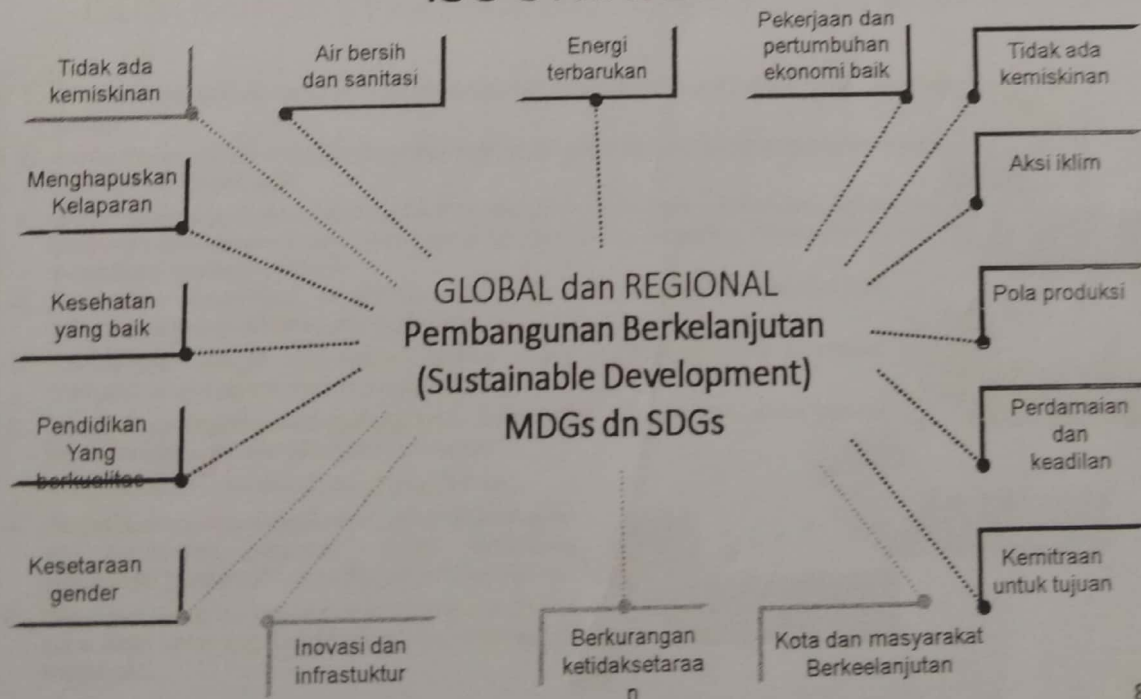
06

PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

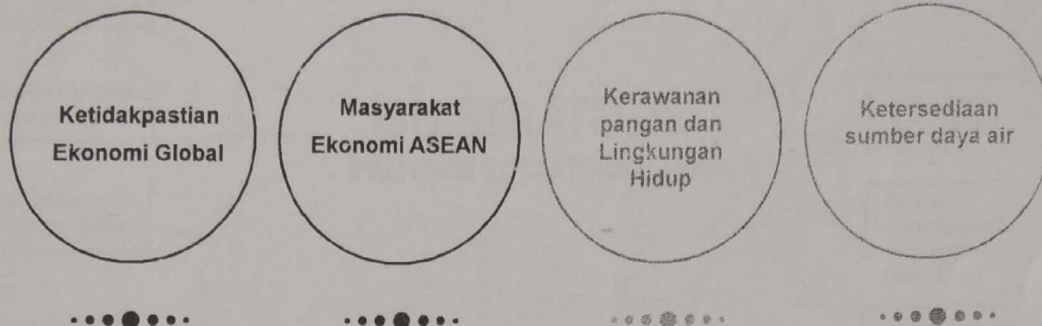


PERUBAHAN RPJMD 2013 - 2018

ISU STRATEGIS



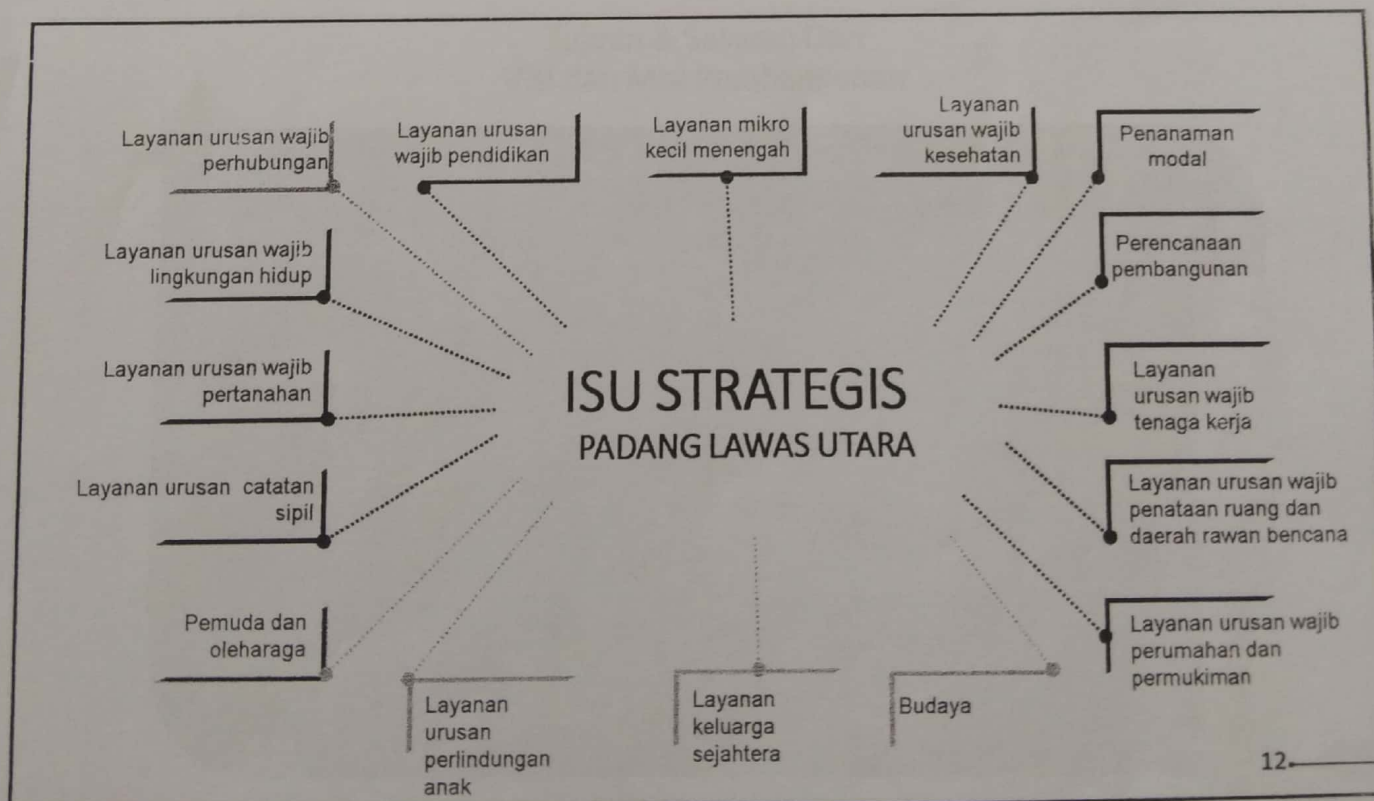
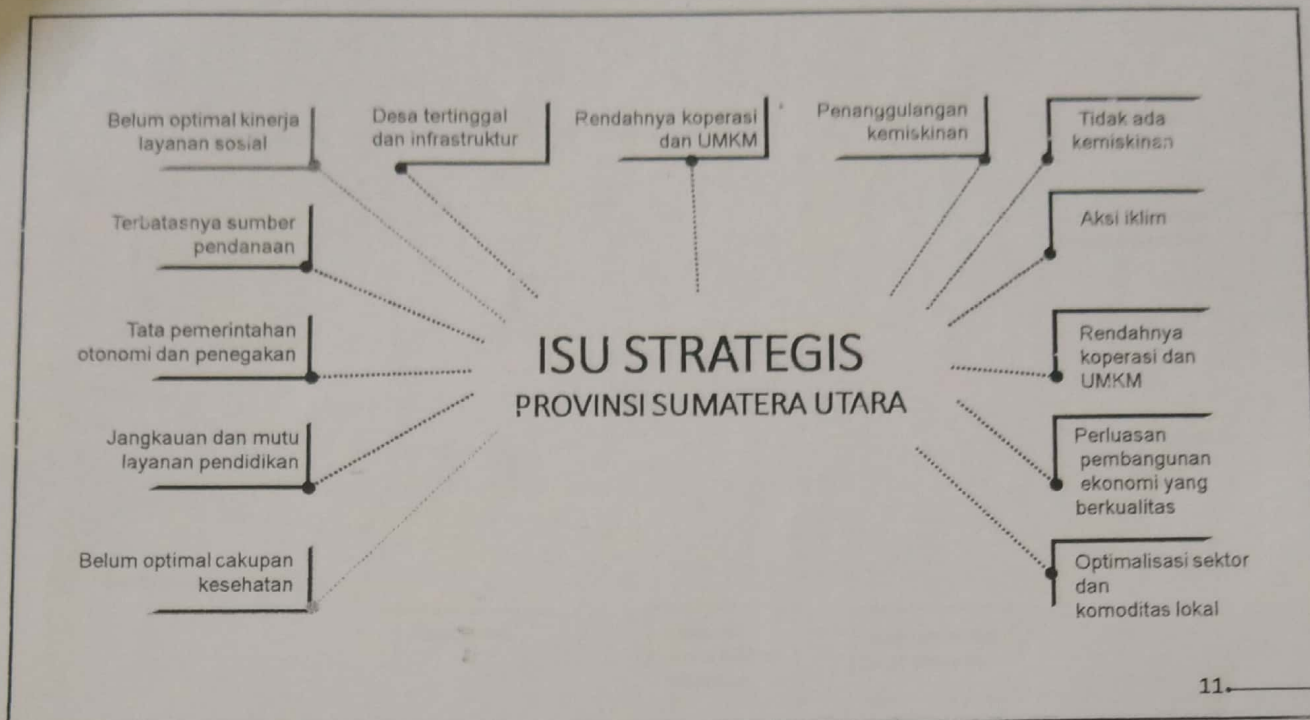
ISU STRATEGIS GLOBAL DAN REGIONAL



ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

ISU STRATEGIS

1. Relatif rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global.
2. Pertumbuhan ekonomi bersumber pada kegiatan ekonomi yang rentan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan serta pendukung ketahanan pangan.
4. Rendahnya aksesibilitas, konektivitas antarwilayah dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur mengakibatkan ketertinggalan.
5. Kesenjangan wilayah dan ketidakmerataan ruang kegiatan ekonomi berpotensi mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran.
6. Terdapatnya kegiatan perdagangan ilegal lintas batas yang mengakibatkan potensi kebocoran ekonomi dan permasalahan sosial
7. Masih terbatasnya ketersediaan dan distribusi energy.
8. Belum terpenuhinya pengelolaan sistem kelembagaan dan manajemen pemerintah dalam mendukung pencapaian *good governance* dan *clean governance*.
9. Degradasi dan risiko lingkungan akibat perubahan tata guna lahan untuk kegiatan ekonomi yang tidak ramah lingkungan.





Tujuan

Sasaran

VISI

**"Bersama Membangun
Padang Lawas Utara
Beriman, Cerdas, Maju
dan Beradat"**

6 MISI

- ☐ Mewujudkan pemerintahan demokratis, aspiratif dan akuntabel
- ☐ Membangun SDM yang sehat, cerdas, Religius dan berdaya asing
- ☐ Membangun Infrastruktur dan pembangunan wilayah
- ☐ Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya lestari
- ☐ Meningkatkan ekonomi kerakyatan
- ☐ Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perempuan dalam pembangunan

15



EVALUASI RPJMD BERDASARKAN SKPD BARU

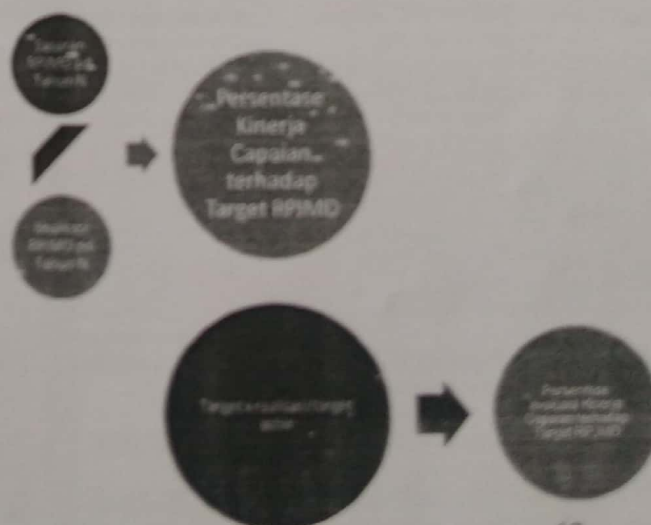
KERANGKA PERENCANAAN RPJMD PADANG LAWAS UTARA



Ruang Lingkup Evaluasi RPJMD PADANG LAWAS UTARA

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM
1	1	3	13	75
2	1	1	21	40
3	1	1	21	26
4	1	1	15	26
5	1	1	4	15
6	1	1	3	21
Total	6	8	77	203

Menghitung Kinerja RPJMD



PERBUP

34

LAMA BARU

34

32

PERBUP
NO. 34
THN
2016

19

No	Nama Dinas/Badan baru	Nama Dinas/Badan Lama		
1	Sekretariat daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten	21	Dinas pertanian
2	sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD		Dinas Pertanian
3	inspektorat	Inspektorat	22	Dinas ketahanan pangan
4	Dinas pendidikan	Dinas Pendidikan		Badan penyuluhan, pertanian dan ketahanan pangan
5	Dinas kesehatan	Dinas Kesehatan	23	Diras lingkungan hidup
6	Satuan pamong praja	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja		Kantor Lingkungan Hidup
	Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	24	Dinas perhubungan
7	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	Kependudukan dan Catatan Sipil		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
8	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	Baan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa/kelurahan	25	Badan perencanaan, pembangunan daerah
9	Dinas komunikasi dan informatika	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10	Dinas perdagangan dan perindustrian	Dinas perindustrian dan perdagangan	26	Badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah
11	Dinas kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata		Dinas pendapatan, pajak, keuangan dan aset daerah
12	Dinas pariwisata	Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	27	Badan kepegawaian daerah
13	Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu		Badan Kepegawaian Daerah
14	Dinas ketenagakerjaan dan koperasi usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	28	Badan penanggulangan bencana daerah
15	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman		29	Sekretaris Dewan pengurus Kopri
17	Dinas sosial	Dinas sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi		Sekretariat Kopri
18	Dinas perpustakaan dan kearsipan	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah	30	Kecamatan tipe A
19	Dinas perikanan, peternakan dan kesehatan	Dinas Peternakan dan Perikanan		Kantor kecamatan padang bolak, dolok, batang orang, (Majene), Lingsulu, halongonan, por tibi, simangambat, dolok sigompuan, camat hulu sihapas, halongonan timur, padang bolak tenggara, Ujung batu
			31	Kecamatan tipe B
			32	Kelurahan
			33	
			34	
			35	
			36	
			37	
				Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
				Dinas Kehutanan dan Perkebunan
				Kantor Unit Layanan Pengadaan
				RSUD Gunung Tua
				Dinas Kebakaran, Pertambangan, dan Kebersihan

Misi - 1

mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, aspiratif dan akuntabel demi tercapainya masyarakat yang maju dan sejahtera,

Tujuan :

menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) yang demokratis dan berlandaskan hukum.

75 program. 63 program telah selesai. 7 Program belum tercapai, 5 program akan tercapai

SKPD PENANGGUNG JAWAB

- ☐ Badan kepegawaian daerah
- ☐ Sekretariat daerah
- ☐ Badan pengelolaan pendapatan dan aset daerah
- ☐ Dinas perhubungan
- ☐ Dinas komunikasi dan Informatika
- ☐ Inspektorat
- ☐ Kecamatan tipe A dan B
- ☐ Dinas kependudukan dan catatan sipil
- ☐ Dinas perpustakaan dan kearsipan
- ☐ Badan perencanaan, pembangunan daerah
- ☐ Sekretariat DPRD
- ☐ Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
- ☐ Sekretariat Daerah
- ☐ Satuan pamong praja

Apabila RPJMD berubah, berarti kinerja juga di rubah.

PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR	TARGET RPJMD			TARGET AKHIR	REALISASI		CAPAIAN S/D 2015	% CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
			2014	2015	2016	2018	2014	2015			
Program peningkatan dan pengembangan tata kelola keuangan daerah	Badan pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah	Optim. BPK terhadap laporan keuangan	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP		▶
Program pemerataan pemerintahan yang baik	Sekretariat Daerah	Nilai akuntabilitas kerja pemerintah daerah	8	8	8	8	C	C	C		▼
Program peningkatan kapasitas lembaga pemerintahan daerah	Sekretariat DPRD	Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dilihat dari jumlah SKPD membentuk unit pengelola keterbukaan informasi (PPID) %	60	60	60	60	40	45	42,5	70,83	▶
Program peningkatan pelayanan publik	Sekretariat Daerah	e-office	1	1	1	1	0	0	0	0	▼
Program pengembangan data dan informasi	BAPPEDA	e-planning	1	1	1	1	0	0	0	0	▼
Program peningkatan kinerja	Sekretariat Daerah	e-performance	1	1	1	1	0	0	0	0	▼

PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR	TARGET RPJMD			TARGET AKHIR	REALISASI		TAMPAK S/D 2015	% LAPAIAN
			2014	2015	2016	2018	2014	2015		
Program peningkatan dan pengembangan tata kelola pendapatan daerah	Badan Pengelolaan keuangan, pendapatan aset daerah	Penetapan APBD dan perubahan APBD tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
Program pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat	Persentase SKPD menerapkan sistem pengendalian Intern pemerintah (SPIP)	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
Program perencanaan pembangunan daerah	BANPEDA	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan jumlah PERKADA (Jlh dokumen)	1	1	1	5	1	1	2	40
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Badan Kepegawalan Daerah	Jumlah PNS mendapatkan pendidikan formal dan non formal dalam bentuk tugas belajar dan ikatan dinas (orang)	21	17		114	22	19	41	35,96
Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Badan Kepegawalan Daerah	Jumlah peserta/PNS diklat PIM II, III, dan IV	10	15	15	75	0	0	0	0
Program pendidikan	Sekretariat DPRD	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	2	2	2	14	4	4	8	57,14

Misi – 2

Membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas dan kompetensi tinggi

Tujuan :

Menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, religius, bermoral, beretika, berbudaya dan berdaya saing

Terdiri dari 40 program, 11 akan tercapai, 2 tidak tercapai

SKPD PENANGGUNG JAWAB

- ☐ Dinas sosial
- ☐ Dinas pendidikan
- ☐ Dinas perpustakaan dan arsip daerah
- ☐ Dinas kesehatan
- ☐ Dinas kepemudaan dan olahraga
- ☐ Dinas pariwisata

Terdiri dari 26 program, 11 tidak tercapai, 1 akan tercapai

SKPD Penanggung Jawab

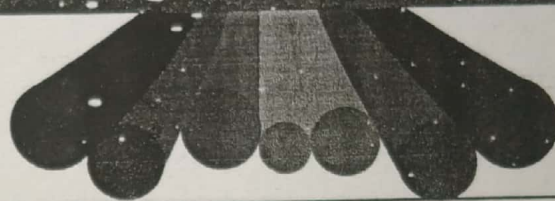
- ☐ Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
- ☐ Dinas perhubungan
- ☐ Dinas komunikasi dan informatika
- ☐ Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
- ☐ Sekretariat daerah
- ☐ Dinas lingkungan hidup
- ☐ SAPPEDA
- ☐ Badan penanggulangan bencana
- ☐ Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman

Misi – 3

Membangun dan meningkatkan infrastruktur dan pengembangan wilayah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi ketimpangan antar wilayah

Tujuan :-

Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi sosial yang berwawasan lingkungan serta pengurangan ketimpangan antar wilayah



PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR	TARGET RPJMD			TARGET AKHIR	REALISASI		CAPAIAN 5/12 2015	% CAPAIAN	TUGAS POKOK
			2014	2015	2016	2018	2014	2015			
Program peningkatan jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan umum, dan penataan ruang	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	26	28	30	37	11,42	13,44	13,44	36,32	
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya	Dinas Pekerjaan umum, dan penataan ruang	Jaringan irigasi kabupaten berfungsi optimal	47,32	58,32	68,32	80,32					
Program peningkatan jalan dan jembatan	Dinas Pekerjaan umum, dan penataan ruang	Panjang jalan menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten (km/kabupaten)	10	10	10	10					
Program pembangunan infrastruktur desa	Dinas Pekerjaan umum, dan penataan ruang	Panjang jalan setapak untuk mendukung ekonomi pedesaan (km)	15	20	20	20					
Program sarana transportasi	Dinas perhubungan	Jumlah terminal bus	0	0	2	2					
Program pemukiman dan pengembangan bidang kelistrikan	Dinas Pekerjaan umum, dan penataan ruang	Pembangunan pembangkit listrik tenaga mini hydro	0	2	2	2					

PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR	TARGET RPJMD			TARGET AKHIR	REALISASI		CAPAIAN 5/0 2015	% CAPAIAN	
			2014	2015	2016	2018	2014	2015			
Program pengembangan perumahan	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Kawasan kumuh di perkotaan				16					▼
Program pengembangan perumahan	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Cakupan layanan rumah layak huni yang terlayakau (%)	36	40	45	60					▼
Program pengembangan perumahan	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Cakupan layanan air minum perpipaan	0	0	30	40					▼
Program pengembangan perumahan	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jaringan drainase dengan kondisi baik			20.000						▼
Program perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA	Regulasi daerah terhadap perencanaan dan pengendalian penataan ruang (perda/perbup)	1	1	1	2	0	1	1	50	▶
Program perencanaan pembangunan daerah	BAPPEDA	Tersusunnya rencana detail tata ruang (RDTR) pada kawasan strat- gis (dok)	1	1	1	5	1	1	2	40	

Terdiri dari 26 program, 9 akan tercapai

Misi - 4

Membangun dan mengembangkan ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam lestari, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Tujuan :

Mewujudkan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan

SKPD Penanggung Jawab

- ☐ Dinas ketahanan pangan
- ☐ Dinas pertanian
- ☐ Dinas perikanan, peternakan dan kesehatan hewan

PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR	TARGET RPJMD			TARGET AKHIR	REALISASI		CAPAIAN 5/D 2015	% CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
			2014	2015	2016		2014	2015			
Program pembinaan pembangunan	BAPPEDA	IPM	73,96	73,96	73,96	73,96	66,6	67,35	66,93	66,93	▶
Program peningkatan produksi pertanian	Dinas pertanian	Beras	95.890	100.890		115.890	76.824	70.855	73.840	63,72	▶
Program peningkatan produksi pertanian	Dinas pertanian	Jagung	400	400	400	400	423,50	749,70	392	98	▶
Program peningkatan produksi pertanian	Dinas pertanian	Kedelai	20	100	120	125	123,37	151,50	721,16	721,16	▶
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Dinas perikanan, peternakan dan kesehatan hewan	Daging sapi				600					▶

PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR	TARGET RPJMD			TARGET AKHIR	REALISASI		CAPAIAN 5/D 2015	% CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
			2014	2015	2016		2014	2015			
Program peningkatan ketahanan pangan	Dinas ketahanan pangan	Karbohidrat (Kalon kap/tan)	2.200	2.250		2.400	1.820	1.850	1.630	77	▶
Program peningkatan ketahanan pangan	Dinas ketahanan pangan	Protein (Garam kap/tan)	55	60	60	65	56,7	62,4	62,4	96	▶
Program peningkatan ketahanan pangan	Dinas ketahanan pangan	Jumlah desa rawan pangan	12	15	30	30	15	6	20	67	▶
Program peningkatan ketahanan pangan	Dinas ketahanan pangan	Rola pangan harapan	80	82	85	90	88,9	88,3	88,6	88	▶

Misi 5

Membangun ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja dan kelembagaan ekonomi produktif serta pertumbuhan kesempatan kerja dan berusaha

Tujuan :

Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Terdiri dari 15 program, 2 akan tercapai, 13 telah selesai

SKPD PENANGGUNG JAWAB

- ☐ Dinas ketenagakerjaan, dan koperasi usaha kecil dan menengah
- ☐ Dinas sosial
- ☐ Dinas pariwisata
- ☐ Dinas perdagangan dan perindustrian

PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR	TARGET RPJMD			TARGET AKHIR	PEALISASI		CAPAIA NS/D 2015	% CAPAIA ^{NS}	
			2014	2015	2016	2018	2014	2015			
Program peningkatan kesempatan kerja	Dinas ketenagakerjaan dan koperasi kecil dan menengah	Pengangguran	3,8	3,75	3,56	3,68	10,9	6,0	5,01	73,0	▶
Program peningkatan kesempatan kerja	Dinas ketenagakerjaan dan koperasi kecil dan menengah	Rasio penduduk yang bekerja	0,97	0,98	0,99	0,99	0,89	0,95	0,95	95,9	▶

PROGRAM	SKPD PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR	TARGET RPJMD			TARGET ANGIN	# PENCAPAIAN		CAPAIAN 5/11/2015	% CAPAIAN	STATUS CAPAIAN
			2014	2015	2016	2018	2014	2015			
Program pemberdayaan masyarakat lokal terpadu (KAT) dan pemberdayaan masyarakat lokal (PMKOL) lainnya (APBD)	Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	Komitmen	10,32	9,52	8,81	16,36	0,3	10,9	10,97	67,51	▶
Program pemberdayaan kelembagaan pergoni-landan gender	Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pertemuan partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	57,24	57,23	56,73	56,93	40,31	40,31	40,31	63,69	▶

21 PROGRAM, 19 selesai, 2 akan tercapai

SKPD PENANGGUNG JAWAB

Misi – 6

Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi perempuan di dalam pembangunan.

Tujuan

Mewujudkan pemberdayaan masyarakat, partisipasi perempuan didalam pembangunan

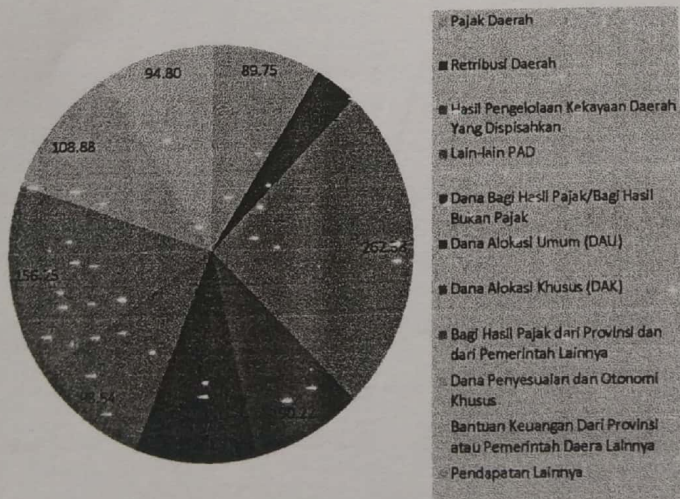
- ☐ Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
- ☐ Badan penanggulangan bencana daerah
- ☐ Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan



KERANGKA PENDANAAN RPJMD

REALISASI PENDAPATAN DAERAH TERHADAP RPJMD

URAIAN	2014		2015	
	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)
PENDAPATAN DAERAH (PAD)	26.000.000.000	19.240.991.004,33	27.000.000.000	26.451.127.760,84
- Pajak Daerah	5.000.000.000	4.487.322.409	6.000.000.000	4.693.774.307
- Retribusi Daerah	18.000.000.000	8.591.623.392	18.000.000.000	5.571.778.896
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disisahkan	-	290.557.944	-	-
- Lain-lain PAD	3.000.000.000	7.871.387.309,33	3.000.000.000	16.165.574.517,84
DANA PERIMBANGAN	481.000.000.000	482.255.151.524	500.000.000.000	504.150.450.000
- Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	30.000.000.000	27.066.718.924	30.000.000.000	14.185.326.603
- Dana Alokasi Umum (DAU)	420.000.000.000	418.726.923.000	450.000.000.000	444.806.362.000
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	37.000.000.000	36.461.510.000	45.000.000.000	45.656.470.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	92.000.000.000	109.274.104.171	32.000.000.000	110.989.867.000
- Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Lainnya	10.000.000.000	25.000.000.000	30.000.000.000	28.025.200.505
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	33.000.000.000	35.930.122.000	55.000.000.000	55.146.685.000
- Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	50.000.000.000	47.401.982.171	24.000.000.000	-
- Pendapatan Lainnya	-	-	28.000.000.000	-

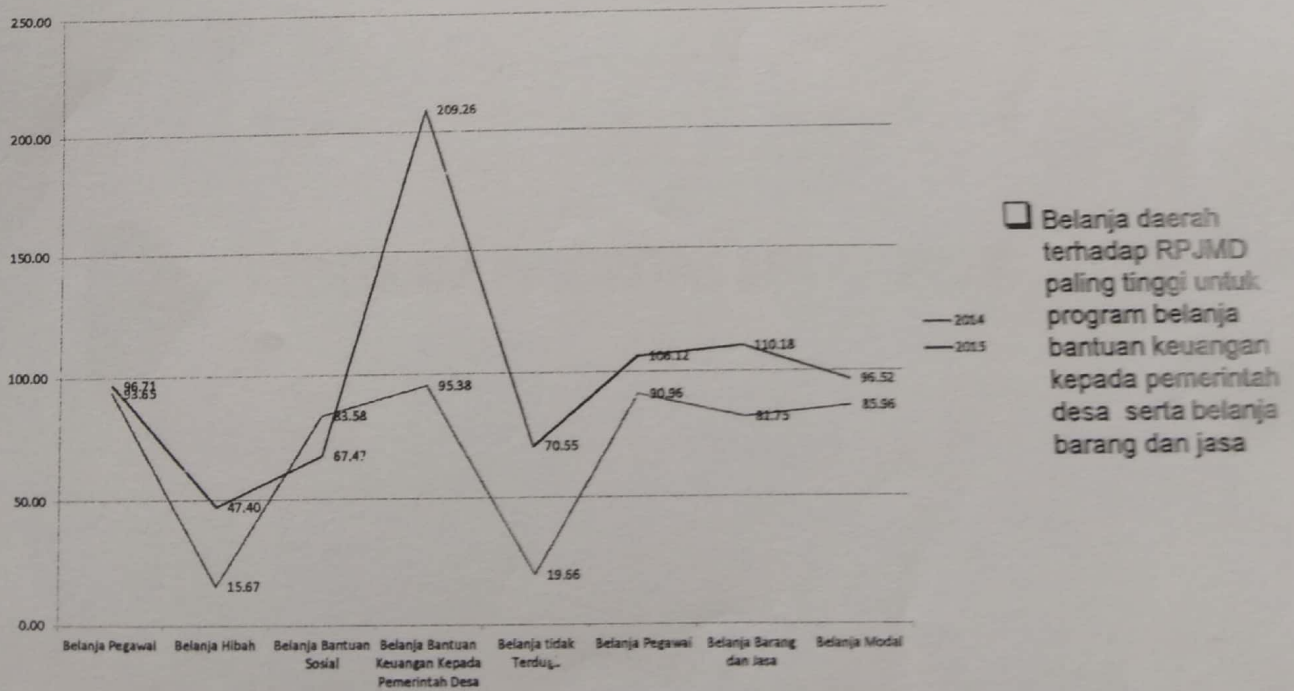


- ☐ APBD tahun 2014 dan tahun 2015 mengalami kenaikan tetapi target RPJMD masih berada di bawah target.
- ☐ pencapaian pendapatan APBD dengan RPJMD pada tahun 2014 hanya mencapai 74% dari Rp. 26.000.000.000,
- ☐ 2015 target pendapatan pada RPJMD adalah Rp. 27.000.000.000,- dan realisasinya hanya sebesar Rp. 26.451.127.760,84,- atau terealisasi sebesar 97,97%.
- ☐ tahun 2014 PAD (74%), Dana Perimbangan (99,03%), dan Lain-lain Pendapatan yang sah (09,43%).
- ☐ tahun 2015 PAD sebesar (97,97%), Dana Perimbangan sebesar (96,12%), dan Lain-lain Pendapatan yang sah (147,55%)

REALISASI BELANJA DAERAH TERHADAP RPJMD

NO	BELANJA	TAHUN 2014		TAHUN 2015	
		RPJMD	REALISASI	RPJMD	REALISASI
1.	Belanja Pegawai	285.000.000.000	248.179.998.317	321.000.000.000	310.927.810.000
2.	Belanja Hibah	7.000.000.000	1.096.811.892	7.500.000.000	3.054.781.089
3.	Belanja Bantuan Sosial	4.000.000.000	3.343.062.751	4.200.000.000	2.835.785.940
4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa				
5.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	22.000.000.000	20.964.489.975	45.000.000.000	34.187.288.094
6.	Belanja tidak Terduga	1.000.000.000	136.848.000	1.000.000.000	705.486.250
B.	BELANJA LANGSUNG	368.000.000.000	312.746.133.341	1.450.000.000.000	1.450.000.000.000
1.	Belanja Pegawai	38.000.000.000	34.565.818.900	31.000.000.000	32.897.105.000
2.	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000.000	108.288.983.293	107.000.000.000	117.835.824.111
3.	Belanja Modal	200.000.000.000	171.911.994.868	178.800.000.000	170.536.395.192
JUMLAH BELANJA		667.000.000.000	529.542.456.737	1.550.000.000.000	1.550.000.000.000

REALISASI BELANJA DAERAH TERHADAP RPJMD



KINERJA RPJMD 2014 - 2015

Tahun	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2013	-	-	-	-	-	-
2014	667.000.000.000	17,54	689.647.496.757	15,42	3.803.119.909.000	32,96
2015	694.000.000.000	18,25	733.622.143.585	19,29	3.803.119.909.000	37,54
Total	1.361.000.000.000	35,79	1.320.169.640.342	34,71	-	-

Tahun 2015 realisasi kinerja RPJMD adalah 19,29

Tahun 2014 realisasi kinerja RPJMD adalah 15,42%

Total kinerja RPJMD sampai tahun 2015 adalah 35,71 artinya masih 65,29% target yang harus dicapai sampai dengan tahun 2018

Target anggaran yang dipakai sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar 1.361.000.000, sedangkan realisasi anggaran adalah 1.320.169.640.342, sisa anggaran sampai dengan tahun 2018 adalah 2.482.950.268.658 dari target anggaran RPJMD 2018 yakni 3.803.119.909.000



PROGRAM PRIORITAS 2017 - 2018

SEKRETARIAT DAERAH

- Program penerapan pemerintahan yang baik melalui nilai akuntabilitas kinerja pemerintah
- Program peningkatan pelayanan publik melalui e-office
- Program peningkatan pengawasan internal dan kebijakan KDH melalui e-performance

1

2

BACAN KEPEGAWAIAN DAERAH

- Program pembinaan pengembangan aparatur melalui pendidikan formal dan non formal dalam bentuk ikatan dinas serta diklat PIM II, III, IV

3

BAPPEDA

- Program pengembangan data dan informasi melalui e-planning
- Rencana detail tata ruang (RDTR) pada kawasan strategis

4

SEKRETARIAT DPRD

- Program pendidikan politik melalui kegiatan pembinaan politik

DINAS PARIWISATA

- Program pembinaan masyarakat dan olahraga melalui gedung kesenian yang dibangun

5

7

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENYATAAN RUANG

- Program peningkatan jalan dan jembatan melalui perbaikan jaringan jalan kabupaten
- Program pengembangan dan pengaspalan jaringan ingasi melalui jaringan ingasi optikal
- Panjang jalan yang menghubungkan pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten
- Pembangunan jalan setapak
- Program pembinaan dan pengembangan bidang kelotiran melalui pembangkit mini hydro

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- program pengelolaan fasilitas kekayaan budaya melalui kegiatan olahraga

6

8

DINAS PERHUBUNGAN

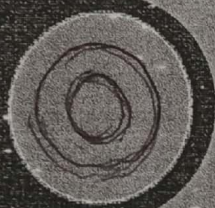
- Program sarana transportasi publik melalui pembangunan terminal bus

Pembangunan Terminal Tipe A
sebelum perencanaan Propos
serasi UU 23 - Hk 2014.

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- ☐ Program pengembangan perumahan melalui pengurangan kawasan kumuh perkotaan
- ☐ cakupan layanan rumah layak huni
- ☐ Cakupan layanan air minum perpipaan
- ☐ Jaringan drainase dengan kondisi baik

TERIMA KASIH



Pak BAPPENAS